

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu isu reformasi pendidikan yang penting dewasa ini adalah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Kesiapan daerah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan sebetulnya masih baru dalam tahap kesiapan psikologis. Kesiapan teknis dan profesionalnya masih perlu dipertanyakan. Untuk menerapkan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai bentuk alternatif yang dipilih dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, kesiapan daerah dan lembaga pendidikan (sekolah) masih diragukan, karena untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi, terutama menyangkut sumber daya manusia, lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketiga persyaratan tersebut harus sinergi satu sama lainnya. Tanpa dukungan dari masyarakat dan dukungan sekolah, MBS tidak mampu meningkatkan kualitas sekolah dalam konteks desentralisasi pendidikan.

Dipilihnya MBS sebagai model desentralisasi pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah karena diyakini model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Sementara itu kebijakan MBS ini masih relatif baru dan merupakan hasil adopsi dari negara lain, sehingga tanpa dukungan sumber daya dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam

pelaksanaannya maka penyimpangan dapat terjadi dan tujuan peningkatan kinerja sekolah sukar terealisasi.

Sapari, (Kompas, 20 April 2001) melakukan pengamatan implementasi kebijakan MBS di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan menyimpulkan bahwa pada umumnya sekolah telah berusaha melaksanakan MBS sesuai dengan petunjuk dari konsultan Unicef, dan masih banyak juga sekolah yang melaksanakan kebijakan MBS ini secara tidak sesuai dengan aturan pelaksanaannya, akibatnya pelaksanaan MBS berjalan tersendat-sendat, pembelajaran aktif semu, partisipasi masyarakat yang masih berjalan di tempat dan manajemen sekolah yang masih belum transparan, hal ini disebabkan karena ketidakberhasilan kepala sekolah dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, guru yang tidak profesional dan masyarakat yang apatis.

Adapun landasan yuridis kebijakan MBS adalah sebagai berikut:

1. UU nomor 20 th. 2003 tentang Sisdiknas , pasal 51 ayat1
2. Kepmendiknas no. 044 th. 2002 tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah
3. 5. PP no. 19 th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu MBS

Selain itu dari hasil sosialisasi selama tiga tahun melalui media cetak yaitu diterbitkannya buku panduan MBS yang berjudul “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah” oleh Depdikbud dan dua tahun melalui

uji coba di beberapa sekolah, ternyata MBS masih dipersepsikan lain dan berbeda oleh pelaksana baik pemerintah Kota/Kabupaten maupun pelaksana di tingkat sekolah, hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang muncul ketika isu desentralisasi pendidikan dimunculkan antara lain adalah: (1) meningkatnya biaya pendidikan yang dikenakan kepada wali murid, yang akan berpengaruh terhadap program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dengan dalih otonomi dan penerapan MBS, di saat penerimaan siswa baru pihak sekolah mengenakan biaya/uang sumbangan sukarela yang telah ditetapkan dengan nilai nominal yang cukup tinggi; (2) seorang guru di SMP (negeri) tempat uji coba program MBS, mempersepsikan bahwa untuk menerapkan MBS agar diikuti dengan peningkatan kualitas kerja guru diperlukan biaya yang besar, dan hal ini sangat memberatkan; (3) seorang Kepala Sekolah menganggap bahwa MBS pada dasarnya adalah transparansi segala hal dan berhubungan dengan upaya pembentukan kemandirian suatu sekolah; dan (4) ada juga yang menganggap bahwa MBS pada hakekatnya adalah swastanisasi, bahkan ada gelagat MBS dijadikan alasan untuk menjadikan sekolah semacam badan usaha milik negara. (Suhartono, Kompas 12 Oktober 2001).

Secara sederhana yang dapat ditarik pemahaman dari berbagai persepsi tentang MBS ialah terjadinya keragaman persepsi mengenai MBS. Selain itu, Dewan Sekolah sebagai “instrumen” ideal desentralisasi pendidikan di daerah dan mempunyai peran penting dalam menyukseskan kebijakan MBS masih belum direalisasikan dan difungsikan oleh daerah, bahkan Sutedjo, (Kompas

6 Juli 2001) menyatakan masih banyak daerah yang tak peduli dengan Dewan Sekolah.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum (general education), artinya pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua negara, tanpa kecuali. Dalam pasal 11 ayat (2) UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir pendidikan. Khusus mengenai sekolah dasar yang dijadikan sebagai tempat penelitian, hal ini mengingat peran pendidikan dasar khususnya sekolah dasar sebagai bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun dan pada tahap inilah keberhasilan murid ditentukan, anak memperoleh dasar-dasar pendidikan yang penting untuk pendidikan selanjutnya, dan diharapkan tahap ini akan membantu mengarahkan pendidikan lebih lanjut termasuk membangun “imajinasi” tentang kehidupannya kelak dikemudian hari. Disamping itu keberhasilan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah akan sangat membantu satuan-satuan pendidikan berikutnya.

Menurut Udoji dalam Abdul Wahab ( 1997 : 69 ) mengatakan bahwa fenomena yang sering terjadi dalam implementasi MBS di sekolah sekolah antara lain kurangnya pemahaman implementor ( Kepala sekolah , guru, tenaga kependidikan ( staf administrasi ), orang tua siswa dan masyarakat terhadap konsep MBS dan pelaksanaannya. Disamping itu kurangnya kesiapan

sumberdaya dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan MBS di sekolah .juga berpengaruh dalam implementasi MBS.

Fenomena tersebut juga terjadi di SMP N 17 kota Pekalongan, terlihat masih rendahnya kualitas lulusan dan masih tingginya jumlah lulusan SMP N 17 kota Pekalongan yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya kualitas lulusan dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi guru ( Kepala sekolah, guru ), tenaga kependidikan terhadap konsep manajemen berbasis sekolah, pengelolaan proses pembelajaran yang kurang efektif, kurangnya kesiapan sumberdaya serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program sekolah. Berikut ini penulis sajikan kualitas akademik siswa SMP N 17 kota Pekalongan dalam Ujian Nasional.

Berikut ini penulis sajikan data prestasi akademik siswa SMP N 17 kota Pekalongan berupa nilai rata-rata tiap mapel dalam UN dari tahun 2006/2007 sampai dengan tahun 2010 / 2011.

**Tabel 1.1**

**Prestasi Akademik : Nilai Ujian Nasional**

No.	Tahun Pelajaran	Rata-rata NUAN					
		B. Indonesia	Matematika	B. Inggris	IPA	Jumlah	Rata-rata Tiga mapel
1	2006/2007	7,18	5,05	5,13	-	17,36	5,79
2	2007/2008	6,72	4,98	4,95	6,08	22,73	5,68
3	2008/2009	7,17	6,70	5,29	6,79	25,95	6,48
4	2009/2010	7,48	6,04	5,68	6,37	25,57	6,39
5	2010/2011	6.73	4.58	5.40	5.92	22.63	5.66

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah sebagai sistem tersusun dari komponen konteks, input, proses, output, dan outcome. Konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh pada proses, proses berpengaruh pada output, dan output berpengaruh pada outcome.

Dilihat dari out put yang berupa data prestasi akademik UN siswa SMP N 17 kota Pekalongan menunjukkan bahwa kualitas rata-rata nilai UN pada tahun 2010 / 2011 menurun dibanding tahun sebelumnya. Berbeda dari kualitas, bila dilihat dari kuantitas kelulusan siswa maka gambarannya seperti data tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**

**Angka Kelulusan dan Melanjutkan**

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi				
		Jumlah Peserta Ujian	Jumlah Lulus	% Kelulusan	% Lulusan yang melanjutkan Pendidikan	% Lulusan yang TIDAK melanjutkan pendidikan
1	2006/2007	146	92	67,12	70	30
2	2007/2008	111	86	77,48	75	25
3	2008/2009	121	99	81,82	80	20
4	2009/2010	117	116	99,15	80	20
5	2010/2011	103	103	100	80	20

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Bila dilihat dari data angka kelulusan di atas yang merupakan out put dari proses pelaksanaan MBS dapat diketahui bahwa secara kuantitas lulusan nmeningkat , tetapi out come masih cukup tinggi 20 % ( jumlah lulusan yang tidak melanjutkan).

Hal tersebut di atas dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya kurang sosialisasi program sekolah, proses pembelajaran yang kurang efektif dan efesien, ataupun kurangnya sumberdaya yang mendukung, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi.

Berikut ini adalah seluruh sumberdaya yang dimiliki SMP N 17 Kota Pekalongan pada bulan Juni 2011. Sumberdaya ini meliputi sumberdaya manusia maupun sumberdaya nonmanusia. Sumberdaya manusia mencakup guru, karyawan, siswa, dan masyarakat. Sumberdaya nonmanusia mencakup sarana prasarana, dan anggaran.

Sumberdaya manusia untuk kategori guru dan kepala sekolah, SMP N 17 Kota Pekalongan memiliki 27 orang guru termasuk kepala sekolah. Sumberdaya ini terdiri dari 22 orang berstatus PNS, dan 5 orang guru berstatus Guru Tidak Tetap.

Untuk lebih jelasnya, sumberdaya manusia untuk kategori guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3**

**Data Guru SMP N 17 N Pekalongan**

<b>Jumlah Seluruh Guru+ Kepala Sekolah</b>				<b>Jumlah Semua</b>		
<b>PNS</b>		<b>GTT</b>		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
6	16	2	3	8	19	27

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Bila ditinjau dari kualifikasi pendidikan, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini.



**Tabel 1.4**

**Kualifikasi pendidikan, status, dan jenis kelamin**

	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan status guru				Jumlah
		PNS		GTT		
		L	P	L	P	
1.	S2	1	1	-	-	2
2.	S1	5	15	2	3	25
3.	D3	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	16	2	3	27

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Dari tabel di atas diketahui bahwa kualifikasi guru SMP N 17 Pekalongan, adalah 2 orang berpendidikan S2 dan 25 orang berpendidikan S1. Maka bila ditinjau dari segi kualifikasi pendidikan guru-guru SMP N 17 kota Pekalongan sudah memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Data tentang jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar pendidikan (keahlian), dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**

**Jumlah Guru dengan Tugas Mengajar**

No.	Guru	Jumlah guru dengan Latar Belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar				Jumlah guru dengan latar belakang yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar				Jumlah
		D1/D2	D3	S1/D4	S2	D1/D2	D3	S1/D4	S2	
1.	IPA			3						3
2.	Matematika			3						3
3.	Bahasa Indonesia			2			1			3
4.	Bahasa Inggris			3						3
5.	Pendidikan Agama			1						1
6.	IPS			2	1					3
7.	Penjaskes			1			1			2
8.	Seni Budaya			1						1
9.	PKn			2						2
10.	TIK/Ketrampilan			1						1
11.	BK			2	1					3
12.	Bahasa Jawa			1						1
13.	Tata Boga			1						1
	<b>JUMLAH</b>			23	2		2			27

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Dari tabel di atas diketahui, bahwa hampir seluruh guru yang ada sudah mengajar sesuai dengan latar pendidikan (keahliannya), kecuali ada 2 orang guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar pendidikan (keahliannya) ialah guru bahasa Indonesia mengampu mata pelajaran bahasa Jawa, dan 1 orang guru penjaskes mengampu mata pelajaran TIK.

Sedangkan untuk data pegawai administrasi SMP 17 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.6**

**Data pegawai SMP Negeri 17 Pekalongan**

Jumlah pegawai				Jumlah Semua		
PNS		Honore r/PTT				
L	P	L	P	L	P	Jumlah
2	-	5	3	7	3	10

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Dari tabel di atas diketahui bahwa pegawai administrasi SMP N 17 Pekalongan berjumlah 10 orang. Pegawai administrasi ini terdiri dari 2 orang berstatus PNS dan 8 orang berstatus honorer atau PTT.

Bila dilihat dari pendidikan karyawan SMP N 17 Pekalongan dapat diketahui dari data pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.7**

**Tenaga Kependidikan**

No.	Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga pendukung					Jumlah tenaga pendukung berdasarkan jenis kelamin				Jumlah
		>SD	SMP	SMA/ SMK	D1/ D2	D3/ S1	PNS		Honore r		
							L	P	L	P	
1.	Kepala Tata Usaha			1			1				1
2.	Tata Usaha			3		2	1		2	2	5
3.	Perpustakaan			1						1	1
4.	Penjaga Sekolah	1	1						2		2
5.	Keamanan/ Satpam			1					1		1
	<b>JUMLAH</b>	1	1	6		2	2		5	3	10

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Dari tabel di atas diketahui bahwa pegawai administrasi SMP N 17 Pekalongan, 1 orang berpendidikan SD, 1 orang berpendidikan SMP, 6 orang berpendidikan SMA/SMK, dan 2 orang berpendidikan D3/S1.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dilapangan, jumlah siswa SMP N 17 Pekalongan setiap bulannya dapat berubah. Namun, sesuai dengan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2011 maka data jumlah siswa yang diambil pada bulan Juni 2011.

**Tabel 1.8**

**Data Siswa SMP N 17 Pekalongan**

<b>Data siswa</b>				
<b>Kelas</b>		<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
<b>Kelas</b>	<b>Jumlah</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	
VII	4	67	82	149
VIII	5	70	79	149
IX	3	60	54	104
Jumlah				402

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada bulan Juni 2011 jumlah keseluruhan siswa SMP N 17 Pekalongan adalah 402 orang yang terdiri dari 4 kelas untuk kelas VII, 5 kelas untuk kelas VIII, dan 3 kelas untuk kelas IX. Jumlah ini terdiri dari 149 siswa kelas VII, 149 siswa kelas VIII, dan 104 siswa kelas IX.

Adapun kondisi ekonomi dan pendidikan siswa SMP N 17 Pekalongan penulis sajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.9**

**Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Orang tua siswa**

Kondisi Ekonomi dan Pendidikan	Jumlah dalam %
<b>Kondisi Ekonomi</b>	
Tingkat Atas	0
Tingkat Menengah	20
Tingkat Bawah	80
<b>Pendidikan</b>	
Tamat SD	50
Tamat SMP/Mts	25
Tamat SMA	10
Tamat PT	5

Sumber: SMP N 17 Pekalongan

Berdasar tabel di atas diketahui kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua siswa sebagai berikut. Bila dilihat dari segi kondisi ekonomi 0 % ekonomi tingkat atas, 20 % tingkat menengah dan 80% tingkat bawah. Dari segi pendidikan orang tua siswa diketahui 50% tamat SD, 25 % tamat SMP, 10 % tamat SMA, dan 5% tamat Perguruan Tinggi.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Suwitri, 2008:82) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu program salah satunya dipengaruhi oleh sumber keuangan yang mencukupi dan komitmen serta kemampuan pelaksana. Aktor utama dalam pelaksanaan MBS ini pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen pendidikan nasional Kabupaten Semarang yang meliputi Kepala Diknas beserta jajaran birokrasi serta guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS ). Kenyataan yang ada masih ada guru yang belum memenuhi kelayakan dalam mengajar.

Guru merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi professional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pemabngunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Sholeh, 2006:30).

Terjadinya ketidaklayakan guru mengajar, bisa jadi disebabkan ada banyak guru mengajar materi pengajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Guru lulusan Teknik mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia misalnya. Kemungkinan juga dikarenakan kekurangan guru di sebuah sekolah, sehingga adanya sarjana di daerah itu dengan lulusan apapun diangkat menjadi pegawai honorer di sana. Hal banyak menimpa sekolah-sekolah pinggiran.

Penulis memilih pengelola sarana dan prasarana serta pengelola pembiayaan pendidikan karena dalam kinerja pendidikan dasar menengah pada aspek peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang menjadi indikatornya adalah sarana prasarana meliputi: kondisi ruang kelas, fasilitas sekolah, perpustakaan, lapangan olahraga, UKS, laboratorium, keterampilan, bimbingan penyuluhan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan, Bab VII Standar Sarana dan prasarana, pasal 42 menegaskan bahwa (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mutu sarana prasarana yang ada di SMP N 17 kota Pekalongan kurang memadai terutama yang berupa buku paket untuk mapel Ujian Nasional dan buku referensi lain . Begitu pula alat – alat laboratorium seperti alat-alat praktek IPA. Disamping itu untuk lingkungan di SMP N 17 Pekalongan bila hujan tampak banjir dan kumuh . Kondisi seperti itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran.

Tentang pengelolaan biaya pendidikan, sesuai pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 pemerintah memiliki kewajiban konstitusi (constitutional obligation) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Juga ditegaskan dalam UU organiknya, yaitu UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedisnasan harus dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sector pendidikan dan

minimal 20% APBD. Berikut ini anggaran pendapatantahun belanja sekolah ( APBS ) SMP N 17 Pekalongan 3 tahun terakhir.

**Tabel 1.10**

**APBS SMP N 17 Pekalongan Tahun 2009/2010, 2010/2011 dan 2011/2012 di luar gaji**

Sumber Dana	Tahun Anggaran		
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
APBN ( BOS)	242.369.000	242.369.000	297.490.000
APBD	127.892.000	116.635.000	106.726.000
IURAN ORANGTUA	96.000.000	120.000.000	178.715.000

Sumber : SMP N 17 Pekalongan

Dari tabel di atas diketahui bahwa APBN yang berupa BOS pada tahun 2011/2012 ada kenaikan dibanding tahun lalu , tetapi anggaran dari APBD tahun 2011/2012 menurun, sedangkan iuran dari orangtua dari tahun 2009/2010 s.d. 2011/2012 ada kenaikan. Dana Bos ada kenaikan tahun 2011/2012 namun diiringi dengan larangan menarik dana dari masyarakat melalui Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2011 tentang larangan pemungutan dana dari masyarakat itu artinya Pemerintah di satu sisi menambah biaya tetapi disisi lain mengurangi dan hal itu sangat berpengaruh pada kinerja sekolah.



Masalah keterlibatan masyarakat yang berupa partisipasi masyarakat terhadap program-program sekolah masih banyak mengalami kendala, seperti kurangnya intensitas pertemuan dengan sekolah, kurangnya komite dalam memahami fungsi dan tugasnya, serta rendahnya kompetensi masyarakat itu sendiri terhadap program-program sekolah.

Persoalan-persoalan di atas melatarbelakangi keinginan peneliti untuk mencermati dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai kebijakan peningkatan mutu pendidikan dasar di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih khusus lagi mengenai implementasi dari kebijakan MBS, yang dalam implementasinya kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh pelaksana program sedangkan MBS itu sendiri mempunyai karakteristik yang harus dipahami oleh sekolah yang akan menerapkan MBS.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan kebijakan MBS sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 17 Kota Pekalongan?
2. Bagaimanakah kesiapan sumberdaya di SMP Negeri 17 Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan kebijakan MBS?
3. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 17 Kota Pekalongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dicapai. Secara umum yaitu dapat memberikan gambaran mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di era desentralisasi dan otonomi daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 17 Kota Pekalongan
2. Kesiapan sumber daya di SMP Negeri 17 Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan MBS. .
3. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 17 Kota Pekalongan

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan teori-teori Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik khususnya kebijakan bidang pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara praktis berupa masukan gambaran realitas kepada SMP Negeri 17 Pekalongan

tentang kesiapan sumber daya, proses implementasi kebijakan, keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan MBS. Dengan adanya masukan tersebut SMP Negeri 17 Kota Pekalongan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi MBS yang diharapkan bermuara pada meningkatnya kinerja para warga sekolah dan mutu sekolah.